

ABSTRAK

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah lembaga yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dibidang piutang negara, KPKNL diberi wewenang untuk mengelola piutang negara secara optimal. Laporan tugas akhir ini menjelaskan tentang sistem dan prosedur pengelolaan piutang negara. Piutang negara terjadi karena adanya debitur yang tidak mampu menyelesaikan atau membayar hutangnya kepada negara. Dalam rangka penyelesaian pengelolaan piutang negara, KPKNL mempunyai wewenang untuk menerbitkan atau mengeluarkan surat paksa. Laporan ini khusus membahas tentang penyelesaian kasus piutang negara yang berada di RSUP Dr.Sardjito. Piutang tersebut terjadi karena pihak debitur atau pasien tidak melakukan pembayaran hutang mereka. Piutang RSUP Dr. Sardjito bisa diselesaikan dengan upaya surat paksa. Setelah upaya penagihan yang dilakukan KPKNL telah maksimal, maka hal yang dapat dilakukan adalah melakukan Piutang Negara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengelolaan piutang negara di KPKNL Yogyakarta sudah baik, namun pemerintah harus lebih tegas dalam pengelolaan agar mendapat hasil maksimal.

Kata Kunci : KPKNL, prosedur, piutang negara

ABSTRACT

The Office of State Assets and Auction Services (KPKNL) is an institution that has the task of carrying out services in the field of state assets, valuations, state receivables and auctions. In carrying out its duties in the field of state receivables, the KPKNL is authorized to manage state receivables optimally. This final report describes the system and procedure for managing state receivables. State receivables occur because there are debtors who are unable to settle or pay their debts to the state. In the context of completing the management of state receivables, the KPKNL has the authority to issue or issue forced letters. This report specifically discusses the settlement of cases of state receivables at the Dr.Sardjito General Hospital. These receivables occur because the debtor or patient does not pay their debts. Receivables from RSUP Dr. Sardjito can be resolved by attempting a forced letter. After the KPKNL collection efforts have been maximized, then the thing that can be done is to make the State Debt Unbilled (PSBDT). The conclusion in this study is the management of state receivables at KPKNL Yogyakarta is good, but the government must be more assertive in management in order to get maximum results.

Keywords: KPKNL, procedures, state receivables